

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN NOTARIS PADA MASA CUTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (UUJN)

Oleh

Syarleyta Simanjuntak

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan jabatannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan dalam Pasal 17 UUJN bahwa salah satu larangan yang tidak dapat dilanggar oleh Notaris adalah untuk Notaris melakukan rangkap jabatan. Namun tidak ada larangan bagi Notaris untuk melakukan pekerjaan lain di masa cuti. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pengaturan rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta kewenangan dan tanggung jawab notaris tersebut.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan masalah. Data yang digunakan dikumpulkan dari data sekunder, termasuk studi kepustakaan dan studi dokumen. Data-data tersebut kemudian diolah sedemikian rupa untuk diperiksa, diklasifikasikan, dan disistematisasi sebelum diambil kesimpulan melalui analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf d-h Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris tidak dapat melakukan pekerjaan lain selama belum mengajukan cuti. Notaris dapat melakukan pekerjaan lain selama masa cuti selama tidak melanggar larangan yang diatur dalam UUJN. Selama masa cuti, notaris menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang melaksanakan tugas notaris yang mengambil masa cuti, akan tetapi notaris tersebut tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuat walaupun sedang dalam masa cuti.

Kata Kunci: *Masa Cuti, Notaris, Rangkap Jabatan.*

ABSTRACT***JURIDICAL ANALYSIS OF CONCURRENT NOTARY POSITIONS DURING
THE LEAVE PERIOD ACCORDING TO LAW NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 30 OF 2004
CONCERNING THE OFFICE OF NOTARY (UUJN)*****By****Syarleyta Simanjuntak**

Notary is a public official who in carrying out his/her position must comply with Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, stated in Article 17 of the UUJN that one of the prohibitions that cannot be violated by Notary is for Notary to hold concurrent positions. However, there is no prohibition for Notary to do other work during the leave period. The problem in this study related to the regulation of concurrent positions carried out by notaries based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (UUJN and the authorities and responsibilities of said notaries

The research was conducted using normative legal research methods and descriptive methods, with a statutory approach as the problem approach. The data used was collected from secondary data, including literature studies and document studies. The data were then processed in such a way as to be examined, classified, and systematized before conclusions were drawn through qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that based on article 17 letter d-h of the Notary Position Law, notaries cannot concurrently hold positions as long as they have not applied for leave. Notaries can do other work during their leave period as long as they do not violate the prohibitions stipulated in the UUJN. During the leave period, the Notary submits the Notary Protocol to the Substitute Notary by carrying out his/her duties, yet the notary is still responsible for the deed made even during the leave period.

Keywords: Dual Position, Leave Period, Notary.